PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 07 Juni 2014 Halaman: 9

Haryadi Minta PNS Netral

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berharap dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap menjaga netralitasnya. Namun demikian PNS juga diharapkan tetap mengunakan hak pilihnya.

"Seluruh jajaran PNS Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan untuk memiliki komitmen netralitas yang tinggi dan dewasa," kata pria yang akrab disapa HS tersebut ketika ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (6/6).

Haryadi menjelaskan netralitas PNS di Pilpres adalah dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Karena apabila terlibat dalam politik praktis, dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi terganggu.

"Jangan berat sebelah, tetapi di tengah-tengah dan tetap melaksanakan hak pilih. Harapanya betul-betul netral menjalankan fungsi pemerintahan, karena yang kita layani adalah masyarakat," tambah HS.

Selain itu, Haryadi juga berharap dalam pelaksanaan Pilpres yang saat ini sudah memasuki masa kampanye, kantor-kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta tetap bersih dari alat peraga kampanye (APK). Haryadi sendiri menolak bergabung dengan tim pemenangan salah satu calon presiden. Ia menolak bergabung dan ingin fokus dalam tugasnya sebagai wali kota Yogyakarta.

Bersambung ke Hal 14

Haryadi Minta

Sambungan Hal 13

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno menyebutkan salah satu kerawanan dalam kampanye Pilpres adalah keterlibatan pemimpin daerah menjadi tim sukses pasangan calon. Selain itu kemungkinan memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye juga besar.

"Yang menjadi rawan saat kampanye adalah keterlibatan pemimpin daerah yang ikut tim sukses. Selain juga pemanfaatan fasilitas negara saat kampanye," kata Agus.

Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya arahan kepada PNS untuk mencoblos pasangan tertentu. Adapun soal keterlibatan PNS dalam kampanye, Agus menyebut hal tersebut akan mudah dibuktikan dan dapat dijerat hukum.

"Keterlibatan PNS saat kampanye mudah dibuktikan dibandingkan dengan kasus *money politik*," kata Agus. **(dnh)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005